

PERSEKUTUAN LIMA AJATAPPARENG DI SULAWESI SELATAN ABAD KE-16

Muhammad Amir

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar

Jalan Sultan Alauddin – Talasalapang Km 7 Makassar, 90221

Telepon (0411) 885119,883748, Fax (0411) 865166, HP 081344797300

Email: muhabpnb@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan latar belakang, proses pembentukan, dan dinamika persekutuan Lima Ajatappareng. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa persekutuan ini dibentuk dalam rangka menjalin kerjasama antarkerajaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman di wilayah Ajatappareng. Pembentukan ini bukan hanya dilatari oleh meningkatnya persaingan antarkerajaan dalam mengontrol perdagangan dan lahan pertanian, melainkan juga karena terjadinya penurunan ekspor seiring dengan meningkatnya permintaan luar atas barang-barang dari wilayah Ajatappareng. Persekutuan ini bukan hanya semakin mengukuhkan kedudukan Suppa sebagai bandar niaga komoditi ekspor terutama beras, tetapi juga melapangkan terbangunnya kekuatan maritim yang tangguh dan berhasil menaklukkan sejumlah daerah pesisir di sepanjang pantai barat Sulawesi. Itulah sebabnya bandar niaga ini semakin ramai didatangi oleh pedagang, termasuk pedagang Melayu sehingga Ajatappareng memiliki kedudukan penting dalam perdagangan maritim pada abad ke-16. Selain itu, perjanjian yang mendasari terbentuknya persekutuan ini juga mengandung nilai persaudaraan, kesetaraan, kebersamaan, toleransi, persatuan dan kesatuan.

Kata kunci: *persekutuan, kerajaan, dan Lima Ajatappareng*

A. PENDAHULUAN

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dalam menata kehidupan bersama di daerah ini, tidak sedikit melahirkan perjanjian perdamaian dan persahabatan atau kerjasama antarkerajaan (Amier, 1989: xii-xv).¹ Pada umumnya perjanjian yang mendasari hubungan antarkerajaan di Sulawesi Selatan, tidak hanya berlandaskan pada sikap persatuan dan kesatuan, tetapi juga pada sikap toleransi dan persaudaraan di dalam membangun dan menata kehidupan bersama di daerah ini (Patunru, 1983; Patunru, 1989; Poelinggomang, 2003:3).² Hal itu memberikan

¹ Sjariffudin Amier misalnya, berdasarkan kajian *lontarak* ia menguraikan 75 perjanjian antarkerajaan di Sulawesi Selatan. Tentu masih terdapat sejumlah perjanjian antarkerajaan yang belum terungkap dalam Disertasi Doktor tersebut.

² Sebagai contoh hubungan antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bone, yang dinyatakan dalam *lontarak* bahwa apabila orang Gowa ke Bone dan bermalam, maka ia (orang Gowa) menjadi orang Bone. Demikian pula sebaliknya apabila orang Bone ke Gowa dan bermalam, maka ia (orang Bone) menjadi orang Gowa. Ikrar yang sama juga dijumpai antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Suppa, Luwu, Wajo, Balanipa (Mandar), serta Gowa dengan Soppeng, Luwu, Balanipa (Mandar), dan antara kerajaan-kerajaan lainnya. Perjanjian antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa, antara lain Perjanjian Tamalate dan Perjanjian Saleppa. Perjanjian Tamalate atau *Uluadae ri Tamalate* (Bugis) atau *Ulukanaya ri Tamalate* (Makassar) ini, juga dikenal dengan “*Sitettongenna Sudanga na La Teariduni*” (L.A. Bone, tt: 17).

petunjuk tentang tingkat toleransi dan simpati masyarakat daerah ini serta keterbukaan diri dan kesediaan mengintegrasikan diri dengan orang lain. Sikap inilah yang juga mendasari lahirnya sejumlah ikrar atau perjanjian persahabatan yang dikenang oleh masyarakat sebagai suatu konsensus dalam kehidupan bersama dan hubungan antarkerajaan di daerah ini. Namun kenyataan itu kurang disadari oleh sejumlah peneliti dan penulis sejarah daerah ini, sehingga pembentukan persekutuan atau aliansi senantiasa dihubungkan dengan usaha untuk melindungi dan mempertahankan diri terhadap ancaman dari kerajaan lain. Padahal sejumlah persekutuan antarkerajaan di daerah ini, tidak hanya berlandaskan pada kepentingan politik dan pertahanan semata, tetapi juga pada hubungan persaudaraan dan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan bersama seperti persekutuan Lima Ajatappareng.³

Salah satu perjanjian kerjasama yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah persekutuan sejumlah kerajaan di wilayah Ajatappareng. Persekutuan ini terdiri atas lima kerajaan (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta) yang terletak di sebelah barat danau (*aja tappareng*), yaitu Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Buaya. Ketiga danau ini hanya dapat terlihat pada musim kemarau, namun ketika musim hujan ketiga danau ini akan menyatu menjadi satu. (Latif, 2012:52; Andaya, 2004:91). Pada abad ke-16, kelima kerajaan itu melakukan perjanjian kerjasama yang kemudian dikenal dengan persekutuan Lima Ajatappareng. Persekutuan ini bersifat konfederasi karena setiap kerajaan mempunyai kedudukan yang sama, tanpa ada salah satu di antaranya yang berstatus sebagai ketua atau pemimpin. Juga setiap kerajaan mempunyai kekuasaan dalam mengatur daerah sepenuhnya atau tetap otonom dalam melaksanakan sistem politik, adat istiadat, dan pola penguasaan tanah di wilayah masing-masing (Latif, 2012: 53; Sugono, dkk., 2008: 723).⁴

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka kajian ini tidak hanya dapat memberikan petunjuk tentang dinamika kesejarahan kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng, tetapi juga tentang hubungan antarkerajaan yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan serta toleransi dan persaudaraan. Namun, jika disimak berbagai persoalan atau konflik sosial di sejumlah daerah yang terjadi akhir-akhir ini, maka muncul dalam pikiran bahwa kesalahan sejarah apa yang telah diperbuat sehingga bangsa kita yang dikenal sangat ramah dan toleransi berubah menjadi anarkis.⁵ Pada sisi lain muncul pemikiran bahwa kita telah melupakan sejarah sehingga

³ Terintegrasinya Kerajaan Gowa dan Tallo misalnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar dipandang sebagai aliansi yang bergiat memperluas wilayah kekuasaan semata. Demikian pula dengan pembentukan persekutuan Tellumpocoe (Bone, Wajo, dan Soppeng) dipandang sebagai usaha untuk melindungi daerahnya bersama terhadap ancaman Kerajaan Makassar.

⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia antara lain disebutkan bahwa konfederasi adalah gabungan dari beberapa negara yang dibentuk untuk kepentingan bersama atau gabungan beberapa kelompok atau organisasi.

⁵ Misalnya konflik Aceh, Papua, Ambon, Poso, dan ATM (Aralle, Tabulahan, dan Mambi) di Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat). Konflik yang terjadi di berbagai daerah itu, tidak saja mengusik panorama kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, tetapi juga telah mengarah pada gejala disintegrasi bangsa. Selain itu, di dalam penataan pemerintahan juga telah memperlihatkan gejala etnosentrisme dan sifat kedaerahan. Jika gejala itu tidak dicermati dan diatasi, maka akan menjadi ancaman bagi persatuan dan keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai contoh, adanya justifikasi isu-isu kesukuan dan kedaerahan dalam pemekaran wilayah, sedangkan dalam pemilihan kepala daerah dimunculkan isu “putra daerah” dan menggunakan simbol-simbol budaya lokal yang sempit. Sementara itu berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh globalisasi memerlukan kekuatan dan ketangguhan budaya bangsa.

kebersamaan, persatuan, dan keutuhan yang telah dibangun dalam kurun waktu yang lama itu telah memudar (Zuhdi, 2003:4). Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan penting dilakukan untuk mengungkapkan dinamika kesejarahan dan hubungan antarkerajaan di daerah Sulawesi Selatan. Sebab, selain dapat memberikan pemahaman tentang dinamika kesejarahan dan hubungan antarkerajaan dalam menata kehidupan bersama di daerah ini, juga dapat memberikan petunjuk dalam membangun jatidiri bangsa dan dapat meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, juga dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang baik dalam penataan pemerintahan dan pemantapan integrasi bangsa, agar terluput dari gejolak disintegrasi bangsa di dalam membangun kekinian dan hari esok.

Sehubungan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini adalah mengapa kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng membentuk persekutuan dalam menata kehidupan bersama di daerah itu? Pokok persoalan ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana asal mula pembentukan kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng? (2) bagaimana latar belakang pembentukan, dan dinamika persekutuan pada abad ke-16? Oleh karena itu, kajian tentang persekutuan Lima Ajatappareng sesungguhnya sangat kompleks, sebab persekutuan ini tidak hanya terdiri atas sejumlah kerajaan yang berdiri sendiri dan berdaulat, tetapi persekutuan ini juga memiliki dimensi politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesemua dimensi ini belum banyak mendapat perhatian dari peneliti dan sejarawan. Kajian yang ada tentang itu hanya mengungkapkan secara sepintas dan pada umumnya tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga latar belakang, penataan persekutuan, dan hubungan antarkerajaan itu belum terungkap secara utuh.

Kajian-kajian itu antara lain adalah persekutuan kerajaan-kerajaan di wilayah *Limae Ajatappareng* oleh Burhanuddin Pabitjara (2006). Kajian yang merupakan Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar ini kurang menggunakan *lontarak* (sumber lokal) dan tidak menguraikan latar belakang terbentuknya persekutuan Lima Ajatappareng. Demikian pula karya Abd. Latif (2012) tentang Konfederasi Ajatappareng 1812-1906, juga tidak menguraikan latar belakang terbentuknya persekutuan tersebut. Bahkan uraiannya tentang pembentukan persekutuan yang disebutkan pada 1582 atau setelah Suppa dan Sawitto ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa. Pernyataan ini kurang didukung oleh fakta yang kuat, sebab berdasarkan sejumlah *lontarak* ditunjukkan bahwa persekutuan Lima Ajatappareng dibentuk sebelum Suppa dan Sawitto ditaklukkan oleh Gowa. Selain itu, karya lainnya yang membahas tentang Ajatappareng adalah Stephen C. Druce (2009). Karya yang sangat kaya data ini tidak menguraikan proses pembentukan dan isi perjanjian yang mendasari persekutuan Lima Ajatappareng. Meskipun demikian ketiga karya akademik itu sangat membantu dan menjadi rujukan penting dalam kajian ini.

B. METODOLOGI

Penggunaan metode dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu keharusan. Di dalam suatu penelitian pada hakekatnya dapat menggunakan berbagai macam cara atau metode (Kartodirdjo,1992:ix; Sjamsuddin,2007:14).⁶ Penggunaan metode tersebut, tergantung dari jenis, persoalan, dan tujuan penelitian (Sumadi,1992:15). Sejarah sebagai bahagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa lampau, memiliki metode tersendiri yang disebut metode sejarah (*historical method*) yang meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah (Garraghan,1975:33; Gottschalk,1986:18).

Sehubungan dengan uraian itu, maka penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Secara tematik dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal (Abdullah, 1985:310), dengan fokus perhatian pada persekutuan Lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian sejarah. Pada intinya metode penelitian sejarah ini meliputi *heuristik* (pencarian dan pengumpulan sumber), kritik (analisa sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Prosedur kerjanya dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada prinsip penulisan sejarah yang secara kronologis. Maksudnya, kritik dilakukan setelah data terkumpul, begitu pula interpretasi dilakukan setelah melalui tahap penilaian atau kritik sumber (Notosusanto,1978:17; Gottschalk,1986:18 dan 34).

Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah penulisan naskah hasil penelitian (historiografi) dalam bentuk kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Sehubungan dengan itu, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan persekutuan dan dinamika kesejarahan atau implikasi sosial yang menyertainya harus dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Berbeda halnya dengan penulisan yang bersifat deskripsi naratif, yang hanya menampilkan gambaran kisah sejarah dalam urutan waktu (kronologis). Biasanya penulisan sejarah yang hanya bersifat deskripsi naratif, tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dan konteks situasional yang mengendap di balik fakta-fakta sejarah.

C. PEMBAHASAN

1. Sekilas Tentang Ajatappareng

Wilayah Ajatappareng yang menjadi fokus penelitian ini terdiri atas lima kerajaan yang terletak di sebelah barat Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Buaya. Pada musim kemarau ketiga danau itu tampak terlihat dengan jelas, tetapi pada musim hujan ketiganya menyatu menjadi satu. Kelima kerajaan yang terletak di bagian tengah jazirah selatan Sulawesi dan sebelah barat ketiga danau itu adalah Kerajaan Suppa, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Rappang, dan Kerajaan Alitta. Dalam perkembangannya, kelima kerajaan itu

⁶ Sebenarnya metode mempunyai hubungan erat dengan metodologi, namun dapat dibedakan antara keduanya. Menurut Sartono Kartodirdjo, bahwa metode dan metodologi adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode adalah “bagaimana memperoleh pengetahuan” (*how to know*), sedangkan metodologi adalah “mengetahui bagaimana harus mengetahui” (*to know how to know*). Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah “bagaimana mengetahui sejarah”, sedangkan metodologi adalah “mengetahui bagaimana mengetahui sejarah”.

membentuk persatuan atau perjanjian kerjasama yang kemudian dikenal dengan persekutuan Lima Ajatappareng. Dalam istilah bahasa Bugis, Lima Ajatappareng terdiri atas sejumlah suku kata, yaitu *lima* (lima), *aja* (barat), dan *tappareng* (danau). Jadi pengertian dari Lima Ajatappareng adalah persekutuan lima kerajaan yang terletak di sebelah barat danau.

Secara geografis wilayah Ajatappareng meliputi dataran subur yang luas di Sulawesi Selatan, terbentang dari bagian selatan hingga ke tengah-tengah kawasan ini. Seorang petualang Portugis yang bernama Manuel Pinto mengunjungi Sidenreng pada 1548 mengisahkan bahwa Sidenreng merupakan negeri yang kaya karena menghasilkan padi, ternak, ikan, dan buah-buahan yang melimpah ruah. Lebih lanjut menurut Manuel Pinto bahwa “Kotanya terletak di tepi danau, di mana perahu besar dan kecil berlayar hilir mudik. Di sekeliling danau itu terdapat kota-kota yang makmur” (Poelinggomang, 2002:27; Druce, 2009: 24). Menurut Barbara S. Harvey, pertanian padi sawah merupakan kegiatan ekonomi penduduk Ajatappareng yang paling utama (Harvey, 1989:18). Itulah sebabnya pada awal pembentukannya, persekutuan ini diarahkan dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Namun dalam perkembangannya, persekutuan ini juga menyangkut pertahanan dan keamanan bersama. Persekutuan ini menempatkan Kerajaan Suppa sebagai pusat perdagangan, antara lain karena letaknya yang sangat strategis di pesisir pantai jazirah selatan Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar (Pabitjara, 2006:14). Walaupun Kerajaan Sawitto berada di pesisir pantai yang sama, tetapi kurang cocok untuk dijadikan pelabuhan, karena tidak mempunyai pulau sebagai penghalang dari terpaan ombak dan angin.

Persekutuan Lima Ajatappareng merupakan salah satu bentuk perjanjian antar-kerajaan di Sulawesi Selatan. Persekutuan yang terdiri atas lima kerajaan yang terletak di sebelah barat ketiga danau tersebut, mengadakan perjanjian kerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman bersama di wilayah Ajatappareng pada abad ke-16. Kelima kerajaan yang menjalin kerjasama dalam rangka menata kehidupan bersama di wilayah itu, merupakan penghasil utama beras di jazirah selatan Sulawesi sejak dahulu. Bahkan wilayah Ajatappareng merupakan lumbung beras di Sulawesi Selatan saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila wilayah ini selalu menjadi ajang perebutan kekuasaan dari luar atau sering menjadi sasaran dari perluasan wilayah dan kekuasaan sejumlah kerajaan, misalnya Kerajaan Soppeng, Luwu, Wajo, Gowa, dan Bone. Pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan itu, tentu turut pula mempengaruhi perkembangan kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng.

2. Asal Mula Pembentukan Kerajaan

Awal berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng belum dapat dipastikan hingga saat ini. Berdasarkan keterangan-keterangan lisan dan naskah lokal berupa *lontarak* (naskah yang semula ditulis pada daun lontar) menunjukkan bahwa, asal mula kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kedatangan seorang pangeran atau putri baik dari atas maupun dari bawah. Dikatakan *Tomanurung* apabila seorang yang tidak diketahui nama dan asal-muasalnya muncul dari atas dan dikatakan *Totompoq* apabila ia muncul dari bawah. Munculnya *Tomanurung* itu biasanya diawali konflik antara satu negeri yang disebut *wanuwa*

(Bugis) atau *boriq* (Makassar) dengan negeri lainnya yang susah didamaikan (PaEni, 1986: 35; Latif, 2012: 57). Dalam sumber-sumber *lontarak* diceritakan bahwa hanya *Tomanurung* yang dapat atau mampu mendamaikan konflik-konflik tersebut. Demikian pula kedatangan *Tomanurung* atau *Totompoq* di wilayah Ajatappareng, tampaknya tidak berbeda dengan kehadiran *Tomanurung* di daerah-daerah lain, seperti Gowa dan Bone. Konsep *Tomanurung* di Gowa dan Bone menjadi tokoh pemersatu yang berhasil memulihkan kehidupan masyarakat yang sebelumnya dikisahkan dalam keadaan *khaos* atau kacau balau dan membangun tatanan pemerintahan yang terorganisir dalam bentuk kerajaan (Patunru, 1983 dan 1989; Amier, 1987: 108; Mattulada, 1985: 419).⁷ Itulah sebabnya *Tomanurung* dianggap sebagai peletak dasar pembentukan kerajaan yang kemudian diangkat menjadi raja pertama.

Demikian pula dengan pembentukan kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng tidak terlepas dari kehadiran *Tomanurung*. Dalam sumber *lontarak* antara lain disebutkan bahwa pembentukan Sidenreng sebagai salah satu kerajaan utama di wilayah Ajatappareng bermula dari kehadiran *Tomanurung* di Bulu Lowa. *Tomanurung* inilah kemudian disepakati oleh orang-orang Sidenreng menjadi penguasa mereka untuk menggantikan *addaoang* Sidenreng sebelumnya yang bernama We Tappalangi (Latif, 2012: 63).⁸ Sementara asal mula pembentukan Kerajaan Sawitto juga tidak terlepas dari kehadiran *Tomanurung*, yaitu *Tomanurung* di Bacukiki yang kemudian kawin dengan *Tomanurung* di Akkajang (Suppa) dan diangkat menjadi

⁷ Kedatangan *Tomanurung* di Gowa misalnya, diawali konflik antara satu negeri (*boriq*) dengan negeri yang lainnya. Ketika itu terdapat sembilan *boriq* dan setiap *boriq* diketuai oleh seorang *gallarang*. Kesembilan negeri atau *boriq* itu adalah Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang, Data, Agang Jekne, Bisei, Kalling, dan Sero. Masing-masing *boriq* itu senantiasa berusaha untuk menguasai *boriq* yang lainnya, sehingga kesembilan *boriq* itu terlibat dalam konflik yang berlarut-larut. Kenyataan itulah yang mendorong dua orang *gallarang* yaitu Gallarang Mangasa dan Gallarang Tombolo berinisiatif mencari tokoh yang dapat mendamaikan konflik-konflik di antara mereka. Kedua *gallarang* itu, akhirnya menemukan seorang perempuan cantik yang duduk di bawah sebuah pohon besar di Bukit Tamalate. Perempuan cantik itu tidak diketahui nama dan asal usulnya. Itulah sebabnya ia disebut *Tomanurung ri Tamalate*. Penemuan *Tomanurung* itu diberitahukan kepada semua *gallarang*, sehingga mereka datang bersama rakyatnya ke Bukit Tamalate untuk menyaksikan dan bertemu dengan tokoh yang disebut *Tomanurung*. Dalam pertemuan itu, salah seorang *gallarang* tampil ke hadapan mewakili *gallarang* lainnya dan berdialog dengan *Tomanurung*. Demikian pula kehadiran *Tomanurung* di Bone juga diawali konflik antara negeri (*wanuwa*) yang satu dengan *wanuwa* lainnya. Terdapat tujuh *wanuwa* yang masing-masing diketuai oleh seorang *matowa* dan berusaha untuk menguasai yang lainnya. Ketujuh negeri atau *wanuwa* itu adalah Ujung, Tibojong, Ta', Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Ponceng, dan Macege. Ketika terjadi konflik di antara mereka, tiba-tiba turun hujan disertai angin puting beliung, kilat sambung menyambung, diiringi petir sambar menyambar, gemuruh guntur dan halilintar silih berganti, bagaikan bumi akan hancur karenanya. Peristiwa itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Ketika situasi menjadi tenang kembali, tiba-tiba orang banyak melihat ada seorang berkain putih berdiri di tengah padang. Mereka kemudian menyangka orang itu sebagai *Tomanurung* karena tidak mengetahui nama dan asal usulnya. Orang banyak hendak mengangkat yang disangka *Tomanurung* itu sebagai rajanya, tetapi ia tidak bersedia dan menyarankan supaya mereka pergi ke Matajang untuk menjumpai *Tomanurung* yang sebenarnya. Di Matajang mereka melihat seorang yang berpakaian kuning sedang duduk di atas batu besar yang datar. Orang yang berpakaian serba putih kemudian mewakili ketua-ketua *wanuwa* dan orang banyak berdialog dengan *Tomanurung*.

⁸ Namun sumber lain menyebutkan bahwa perubahan *addaoang* menjadi *addatuang* terjadi pada masa pemerintahan La Patiroi, bahwa "*Ripinrani asenna addaoangnge mancaji addatuang Sidenreng\ matinroe ri Massepe aseng matena\ iyana addatuang mula-mula rilemme\ apaq makkoi sareagna asellengengne rilemmai tomatee* (L.A. Sidenreng, tt: 4; Patunru, 2004: 80-81). Berdasarkan *Lontarak Akkarungeng Sidenreng*, bahwa *Tomanurung* di Bulu Lowa ditempatkan sebagai raja (*addaoang* atau *addatuang*) Sidenreng yang pertama. *Mula-mula arungnge ri Sidenreng\ iyanaritu Addaoang asenna\ bettuanna allin-rungenna tomaegae\ riebarai pongaju onronna mappake\ makkadaoang tomaegae* (pada mulanya raja di Sidenreng digelar *addaoang*, maksudnya tempat berlindung orang banyak, yang diumpamakan sebagai pohon kayu tempat rakyat berlindung atau berpeluk).

Addatuang Sawitto pertama. Kedua *Tomanurung* inilah yang menjadi cikal bakal raja-raja Sawitto dan Suppa (*L.A. Suppa*, tt: 2-3; *L. A. Sawitto*, tt: 3-4).

Perkawinan antara *Tomanurung* di Bacukiki (Datu Sawitto pertama) dengan *Tomanurung* di Akkajang (Datu Suppa pertama) kemudian melahirkan dua orang lelaki dan seorang perempuan. Putra pertamanya bernama La Tedduloppo yang nantinya menggantikan ayahnya menjadi raja (*addatuang*) di Sawitto dan menggantikan ibunya menjadi *datu* di Suppa.⁹ La Tedduloppo kawin dengan saudara sepupunya di Bacukiki yang bernama We Patoling Arung Cempa. Perkawinan ini melahirkan empat orang anak, dan yang pertama bernama La Putebulu nantinya menggantikan ayahnya menjadi Addatuang Sawitto dan Datu Suppa. Ia tiga kali kawin, dan istri pertamanya adalah bangsawan dari Sidenreng yang tidak diketahui namanya. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang bernama La Paleteang. Istri keduanya adalah putri dari Arung Lowa (Sidenreng) dan istri ketiganya bernama We Tappatana Datu Mario Riwawo putri dari La Botillangi, yang kemudian melahirkan La Makkarawi. Setelah La Putebulu wafat, ia digantikan oleh putra sulung dari istri pertamanya yaitu La Paleteang menjadi Addatuang Sawitto dan putra dari istri ketiganya yaitu La Makkarawi sebagai Datu Suppa (*L.A. Suppa*, tt:3-4; *L.A. Sawitto*, tt:11; *L.A. Sidenreng*, tt: 4-5). Oleh karena itu, La Paleteang dengan La Makkarawi adalah bersaudara seayah (La Putebulu), demikian pula antara La Makkarawi dengan La Pateddungi adalah bersaudara seibu (We Tappatana Datu Mario Riwawo).

Berdasarkan sejumlah sumber bahwa *Tomanurung* di Akkajang kemudian diangkat menjadi Datu Suppa yang pertama dan juga sebagai Arung Rappang pertama. Ia digantikan oleh putrinya yang bernama We Pawawoi menjadi Arung Rappang kedua. We Pawawoi kawin dengan Songko Ulawengge Addatuang Sidenreng kedua (*L.A. Suppa*, tt: 2-3; *L.A. Sidenreng*, tt: 4; Sumber Arsip, Rol. 50/10: 51; Sumber Arsip, Rol. 20/22: 1-2).¹⁰ Perkawinan mereka melahirkan tujuh orang anak (empat putra dan tiga putri), dan salah seorang putra yang bernama La Batara yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi Addatuang Sidenreng ketiga, serta salah seorang putri yang bernama We Maqdupa yang kemudian menggantikan ibunya menjadi Arung Rappang ketiga. We Maqdupa digantikan oleh putrinya yang bernama We Malangkanæe menjadi Arung Rappang keempat, dan ia pun digantikan oleh putranya yang bernama La Pakallongi menjadi Arung Rappang kelima. La Batara kawin dengan Arung Bulu Cenrana Barat yang bernama We Cinadiyo. Perkawinan ini melahirkan dua orang lelaki dan satu orang perempuan. Putra pertamanya yang bernama La Pasampoi yang nantinya menggantikan ayahnya menjadi Addatuang Sidenreng keempat. La Pasampoi juga pergi ke Soppeng kawin dengan We Tappatana putri dari La Botillangi yang kemudian melahirkan La Pateddungi (*L.A. Sidenreng*, tt: 4).¹¹ Oleh karena itu, La Pateddungi yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi Addatuang

⁹ Putra keduanya bernama La Botillangi pergi ke Soppeng dan kawin dengan Datu Mario Riwawo. Perkawinan ini melahirkan seorang perempuan yang bernama We Tappatana yang nantinya menggantikan ibunya menjadi Datu Mario Riwawo. Sementara putrinya bernama We Pawawoi, menggantikan ayahnya menjadi Arung Bacukiki dan ibunya menjadi Arung Rappang.

¹⁰ Sementara sumber lain menyebutkan bahwa Arung Rappang yang pertama bernama Barelaie (Druce, 2009: 316).

¹¹ Putra keduanya yang bernama La Mariase' yang nantinya menggantikan ibunya menjadi Arung Bulu Cenrana Barat, dan ia kawin dengan sepupu satu kalinya Arung Rappang yang bernama We Malangkanæe yang melahirkan La Pakallongi. Putri La Batara yang bernama We Yabeng yang nantinya menjadi raja pertama di Massepe, Sidenreng.

Sidenreng, dan La Pakallongi yang juga kemudian menggantikan ibunya menjadi Arung Rappang adalah berdaudara sepupu satu kali, sebab kedua orang tua mereka adalah bersaudara kandung.

Keberadaan Kerajaan Alitta juga tidak terlepas dari kedatangan *Tomanurung* yang bernama We Bungkobungko (*L. A. Alitta*, tt: 2-8).¹² Ia ditemukan oleh para pemburu dan kemudian mengantar ke Arung Alitta yang bernama La Massora. Rakyat Alitta sangat senang melihat kedatangan We Bungkobungko yang sangat cantik, sehingga bersepakatlah mereka untuk mengawinkan La Massora dengan We Bungkobungko. La Massora merupakan Arung Alitta yang ketiga, sebab sebelum ia berkuasa di Alitta telah ada dua penguasa di Alitta yaitu We Cella¹³ yang kemudian digantikan oleh La Gojeng. Pada masa kekuasaan La Massora, Kerajaan Gowa menaklukkan Suppa, Sawitto, dan Alitta. Ketika itu La Massora ditawan di Gowa. Itulah sebabnya yang menggantikan ibudanya (We Cella) menjadi Arung Alitta adalah saudara sepupunya yang bernama La Gojeng. La Gojeng tidak pernah kawin, karena ia meninggal ketika masih muda. Ketika ia wafat, Gowa membolehkan La Massora kembali ke Alitta untuk menjadi penguasa di Alitta (*L.A. Alitta*, tt: 11).¹⁴

Gambaran singkat tersebut menunjukkan bahwa, asal mula pembentukan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng juga tidak terlepas dari kehadiran *Tomanurung*, yaitu *Tomanurung* di Bacukiki, *Tomanurung* di Akkajang, dan *Tomanurung* di Bulu Lowa. Ketiga *Tomanurung* inilah yang menjadi pangkal atau cikal bakal raja-raja di wilayah Ajatappareng. Perkawinan di antara para *Tomanurung* (*Tomanurung* di Bacukiki dengan *Tomanurung* di Akkajang dan keturunan-keturunan mereka, bukan hanya semakin mempererat dan mengokohkan jalinan hubungan persaudaraan antarkerajaan di wilayah itu, tetapi semakin mendekatkan dan memperkuat hubungan kekeluargaan dan kekuasaan di antara mereka. Oleh karena itu, dapat dipahami jika dalam perkembangannya kelima kerajaan di wilayah Ajatappareng menjalin kerjasama, baik dalam bidang ekonomi (perdagangan) maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada semangat persatuan dan persaudaraan. Itulah sebabnya perjanjian kerjasama antarkerajaan itu dinyatakan sebagai persekutuan lima kerajaan bersaudara.

¹⁴ Menurut Abd. Latif, bahwa ceritera ini juga mau melegitimasi bahwa Alitta lebih muda dan lebih di bawah dari Sawitto dan Suppa. Adapun ceritera tentang We Bungkobungko sengaja ditampilkan untuk melegitimasi bahwa raja-raja Alitta juga mempunyai hubungan dengan *tomanurung*. Oleh karena itu, darah kebangsawanan mereka tidak boleh dipandang rendah dalam percaturan politik kekuasaan dan kebangsawanan di Sulawesi Selatan (Latif, 2012:72-73).

¹⁵ Menurut Stephen C. Druce bahwa setidaknya terdapat tiga faktor utama atas terbentuknya aliansi Sawitto dengan Suppa, Sidenreng, Rappang, dan Alitta pada abad ke-16. *Pertama*, sekitar tahun 1500, Sawitto telah muncul sebagai kekuasaan (negara) yang dominan dalam wilayahnya dan tidak terlalu memperhatikan kohesi internalnya. *Kedua*, tidak berapa lama setelah kekalahan Sidenreng, Suppa mem-prakarsai suatu ikatan kuat dengan Sawitto yang bermaksud mengimbangi kemungkinan penurunan produksi ekspor Sidenreng, terutama karena adanya gejala peningkatan permintaan luar atas barang-barang dari Sulawesi Selatan pada abad ke-16. *Ketiga*, selama abad ke-16 terjadi peningkatan persaingan antara kerajaan-kerajaan utama di Sulawesi Selatan dalam mengontrol perdagangan, lahan pertanian, dan penduduknya, mendorong lima kerajaan ini lebih banyak bekerjasama. Selain itu, meningkatnya pengaruh Kerajaan Gowa di sepanjang pantai barat semenanjung, menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan aliansi antara Suppa dan Sawitto.

3. Latar Terbentuknya Persekutuan

Pembentukan persekutuan Lima Ajatappareng, tampaknya dilatari oleh sejumlah factor (Druce, 2009:233).¹⁵ *Pertama*, pada abad ke-15, Suppa bukan hanya tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang kuat, kaya dan makmur, serta paling berpengaruh di wilayah Ajatappareng, tetapi juga menjadi kekuatan maritim utama di pantai barat Sulawesi Selatan (Perlas, 2006:123).¹⁶ Sementara pada waktu yang sama Sawitto telah muncul sebagai salah satu kerajaan yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat sehingga mempunyai kedudukan penting di wilayah Ajatappareng. Namun Sawitto tidak memiliki kontrol langsung terhadap jalur perdagangan utama pada wilayah-wilayah pesisir atau muara Sungai Saddang yang dikenal dengan Sumpang Saddang.¹⁷ Itulah sebabnya kedua kerajaan itu kemudian menjalin hubungan politik dan perdagangan yang dalam perkembangannya melampirkan terwujudnya persekutuan Ajatappareng.

Kedua, karena terjadinya penurunan ekspor dari Sidenreng setelah kerajaan itu ditaklukkan oleh Kerajaan Luwu dan Wajo. Sementara pada sisi yang lain terjadi gejala peningkatan permintaan luar atas barang-barang dari wilayah Ajatappareng. Sebab, kekalahan Sidenreng tersebut bukan hanya mempengaruhi perdagangan kerajaan ini, karena sebagian daerah kekuasaannya di wilayah *Pitu ri Awa* dan *Pitu ri Ase* yang merupakan penghasil utama komoditi perdagangan, baik hasil pertanian maupun hasil hutan kini dikuasai oleh Wajo. Tetapi juga berdampak pada perekonomian Suppa dan Alitta, sebab komoditi perdagangan untuk ekspor kedua kerajaan ini senantiasa disuplai dari jaringan perdagangan dengan Sidenreng dan Rappang yang kini berada di bawah kekuasaan Luwu dan Wajo. Terlebih lagi karena Luwu dan Wajo mengalihkan jaringan perdagangan hasil pertanian dan hasil hutan dari Sidenreng dan Rappang yang selama ini bertumpu pada pantai barat ke pantai timur jazirah selatan Sulawesi dan diperdagangkan ke pasar luar negeri melalui Sungai Cenrana (Abidin, 1985: 233; Pelras, 2006:135; Amier, 1989:236-240).¹⁸ Itulah sebabnya tidak berapa lama setelah kekalahan

¹⁶ Sementara dalam *lontarak* antara lain disebutkan bahwa *iyakkiya liliq Nepo\liliq Palanro\liliq Bacukiki\liliq Bojo sibawaliliq Soreang\iyandaritu liliqpaduwisenna Suppa* (adapun *liliq Nepo, liliq Palanro, liliq Bacukiki, liliq Bajo*, dan *liliq Soreang* adalah *liliq* pendayungnya Suppa (L.A. *Sidenreng*, tt: 2). Sumber lain menyebutkan bahwa *Suppa \ paliliqna \ Nepo \ Palanro \ Manuba\napanoqe rakalanna\Bojo\Bacukiki\Parangki\ Belawa\ Soreang*. Sementara *Nepo\ napanoqe rakalanna\Sadusung\Atappang\ Cengkenge\ Kutae\ Mareppang\Marimari\Mallawa*. Lebih lanjut disebutkan bahwa meningkatnya kontak dan perdagangan antara Suppa dengan Sidenreng, Rappang, dan Alitta karena adanya peningkatan permintaan hasil pertanian dari Suppa untuk pasar luar negeri (ekspor). Hal inilah yang mendorong ekspansi pertanian dan sentralisasi politik di daerah pedalaman. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa selama abad ke-15 ada peningkatan integrasi ekonomi antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman Ajatappareng, terutama antara Suppa, Sidenreng, Rappang, dan Alitta. Peningkatan integrasi ekonomi ini, juga disertai dengan perkawinan strategis terutama antara Suppa dan Sawitto, sehingga semakin memperkuat aliansi di antara mereka (Druce, 2009:213-214).

¹⁷ Menurut Stephen C. Druce bahwa Sawitto berhasil menjadi kerajaan yang dominan di wilayah Ajatappareng pada akhir abad ke-15, namun ia masih berdiri sendiri – terpisah dari empat kerajaan Ajatappareng lainnya. Pada abad berikutnya, ia bergabung dengan Suppa, Sidenreng, Rappang, Alitta sebagai anggota kelima dari persekutuan Ajatappareng.

¹⁸ Penaklukan Luwu dan Wajo terhadap Sidenreng diperkirakan pada 1508, sebab setahun kemudian (1509) Luwu menyerang Bone. Dalam sumber lain disebutkan bahwa “*Sitaung purana rumpa’ Sidenreng, nasisala Datue ri Luwu’ Dewaraja Arumpone La Tenrisukki’*, *Nakkua ri Cenrana Datue mappatuppu nateriwi Bone...*” (satu tahun setelah kekalahan Sidenreng, berselisilah Datu Luwu Dewaraja dengan Raja Bone La Tenrisukki’. Di Cenrana Datu Luwu mempersiapkan perang untuk menyerang Bone). *Lontarak Sokku’na Wajo*, tt: 148-149).

Sidenreng dan Rappang, Kerajaan Suppa memprakarsai perjanjian persaudaraan dengan Sawitto untuk mengimbangi kemungkinan penurunan produksi ekspor Sidenreng, terutama karena adanya gejala peningkatan permintaan luar atas barang-barang dari Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Jalinan kerjasama antara Suppa dengan Sawitto itu pula yang kemudian turut melapangkan terbentuknya persekutuan Lima Ajatappareng.

Ketiga, karena terjadinya peningkatan persaingan antara kerajaan utama di Sulawesi Selatan, untuk mengontrol perdagangan, lahan pertanian, dan penduduknya. Pada awal abad ke-15, Luwu masih merupakan kekuatan paling dominan di Sulawesi Selatan, ia menguasai Sungai Cenrana dan perkampungan di sepanjang aliran sungai itu mulai dari muara hingga *tappareng karaja* (Danau Tempe dan Sidenreng). Bahkan ia berusaha meluaskan wilayahnya ke arah barat, untuk mengontrol daerah yang merupakan pintu keluar bagi hasil pertanian dan komoditi ekspor lainnya melalui Selat Makassar (Pelras, 2006:135; Druce, 2009: 228).¹⁹ Namun upaya itu mulai menghadapi hambatan pada akhir abad ke-15. Sebab Kerajaan Sidenreng dan Wajo juga berkembang dengan pesat dan tidak ingin berada di bawah kekuasaan Luwu. Itulah sebabnya ketiga kerajaan ini sering terlibat konflik dalam perluasan wilayah dan hegemoni kekuasaan di Sulawesi Selatan (Amier, 1989: 232).²⁰

Selain itu, juga tercatat Kerajaan Bone yang tidak kalah sibuknya dalam memperluas wilayah kekuasaan ke daerah-daerah sekitarnya sejak pertengahan abad ke-15. Sejumlah pemukiman dan dataran pertanian penting di sepanjang pesisir timur dan bagian tengah semenanjung dikuasai dan dijadikan sebagai daerah bawahan, sehingga semakin memperkuat kekuatan ekonomi, tenaga kerja, dan kekuatan militernya. Bahkan ketika La Tenrisukki (1508-1535) menjadi *Arumpone*, ia berhasil menaklukkan Mampu dan daerah-daerah sebelah selatan Sungai Cenrana. Perluasan wilayah kekuasaan Bone terhadap daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Luwu, menjadi penyebab terjadinya konflik antara Bone dengan Luwu pada 1509.²¹ Konflik antara kerajaan dalam perluasan wilayah dan pengaruh kekuasaan tersebut,

¹⁹ Hingga akhir abad ke-15, Luwu masih merupakan kekuatan paling menonjol dan berpengaruh di seluruh wilayah Bugis, termasuk daerah pesisir Danau Tempe dan Sidenreng, pinggir Sungai Walanae dan Cenrana, dataran di sebelah timur dan sepanjang pantai Teluk Bone, Semenanjung Bira, Pulau Selayar, dan wilayah di sebelah timur Teluk Bataeng.

²⁰ Konflik itu tampaknya tidak terlepas dari perebutan wilayah kekuasaan di antara ketiga kerajaan tersebut. Namun dalam *lontarak* dikisahkan bahwa perselisihan antara Datu Luwu dengan Addatuang Sidenreng karena persoalan kura-kura. Datu Luwu memiliki seekor kura-kura yang menge-luarkan tinja emas (karena diberi makan bubuk emas), sehingga menarik minat Addatuang Sidenreng untuk membelinya. Negosiasi antara *suro* Kerajaan Sidenreng dengan pihak Luwu menghasilkan penyerahan kura-kura itu sebagai pemberian cuma-cuma. Akan tetapi kura-kura itu mengecewakan Addatuang Sidenreng (karena tinjanya bukan emas) dan berungkal mengutus *suro* ke Luwu untuk mengembalikannya. Datu Luwu menolak untuk menerima kembali pemberiannya itu. Akhirnya keduanya sepakat menyerahkan persoalan itu untuk dibicarakan (diadili). Kedua belah pihak sepakat menunjuk Datu Pammana (Datu Limpuak) sebagai hakim dan bertemu sebulan kemudian. Dalam perjalanan menuju Pammana pada waktu yang ditentukan, Addatuang Sidenreng berbalik kembali ke negerinya karena diketahuinya bahwa Datu Luwu datang dengan perlengkapan perang. Setelah mengetahui bahwa Addatuang Sidenreng kembali ke negerinya, maka Datu Luwu Dewaraja mengundang Arung Matowa Wajo La Tadamparek bertemu di Topacekdok, yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk menyerang Sidenreng.

²¹ Konflik Bone dengan Luwu tersebut diakhiri dengan perjanjian perdamaian yang kemudian dikenal dengan *Polo Malelae ri Unnyik* (pematahan senjata di Unnyik), yaitu antara Datu Luwu Dewaraja dengan Arumpone La Tenrisukki.

menjadi penyebab lahirnya sejumlah perjanjian perdamaian atau persahabatan antarkerajaan. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam persaingan antarkerajaan itu adalah perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) sejak Tumapa'risi Kallonna (1510-1546) menjadi *Sombaya* (raja). Sebab, sejak itu luas wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo bukan hanya semakin bertambah, tetapi juga pengaruh dan peran politik kerajaan ini semakin meningkat di sepanjang pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada permulaan dekade kedua di paruh pertama abad ke-16 (Tiele, 1880:419; Poelinggomang, 2005a:54).²²

Perluasan wilayah dan hegemoni kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo tersebut, bukan hanya mengancam eksistensi kerajaan-kerajaan di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, tetapi juga kerajaan-kerajaan di pesisir pantai yang senantiasa bergiat dalam perdagangan maritim (Poelinggomang, 2002:24; Patunru, 1983:9). Terutama kerajaan-kerajaan di sepanjang pantai barat jazirah selatan Sulawesi, termasuk kerajaan di wilayah Ajatappareng yang selama ini terlibat dalam perdagangan maritim dan merupakan daerah penghasil beras yang utama di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya Kerajaan Suppa yang selama ini menjalin hubungan perdagangan dengan sejumlah kerajaan di wilayah Ajatappareng, memprakarsai pertemuan dengan Kerajaan Sidenreng, Sawitto, Rappang, dan Alitta pada paruh pertama abad ke-16. Pertemuan antara lima kerajaan itu, masing-masing diwakili oleh Datu Suppa La Makkarawi, Addatuang Sawitto La Paleteang, Addatuang Sidenreng La Pateddungi, dan Arung Rappang La Pakallongi yang juga mewakili Arung Alitta. Hasil pertemuan mereka itu, kemudian melapangkan terwujudnya perjanjian persahabatan atau persaudaraan dan jalinan kerjasama yang dikenal dengan persekutuan Lima Ajatappareng.

4. Terbentuknya Persekutuan Lima Ajatappareng

Perjanjian persekutuan kelima kerajaan di wilayah Ajatappareng, pada hakekatnya bukan hanya bertujuan untuk kepentingan ekonomi dalam arti meningkatkan kesejahteraan bersama, tetapi juga tidak terlepas dari kepentingan politik dan keamanan dalam arti mewujudkan ketenteraman bersama di wilayah Ajatappareng. Adapun isi dari salah satu versi perjanjian persekutuan Lima Ajatappareng, sebagai berikut:

“Adapun persetujuan mereka bersama menegaskan perjanjian yang terdahulu dari orang pendahulunya. Adapun perjanjian kelima raja Ajatap-pareng; Sebuah rumah lima sekatnya, lima petaknya, lima kamarnya, yang mana saja disukai anaknya itulah yang dimasuki, terbuka kelima pintu untuk dilalui anaknya, terbuka juga kelima pintu tersebut dilalui anaknya keluar. Adapun janji kita di Ajatappareng tidak dipaksakan ketidakmauan anaknya, tidak menghalangi keinginannya. Salah satu janji kita di Ajatappareng,

²² Pada tahun 1528, Jorge de Castro memimpin pelayaran niaga dua kapal Portugis dari Malaka dengan tujuan Ternate. Menurut rencana jalur pelayaran yang akan ditempuh adalah jalur pesisir utara Kalimantan. Akan tetapi akibat badai dan ombak kapal dagang itu menyinggahi Pulau Makassar (*Ilhas de Maccazar*). Ketika itu kerajaan yang dikunjungi sedang terlibat dalam perang dan atas permintaan raja, De Castro memberikan bantuan untuk memerangi musuh kerajaan itu. Sebagai tanda terima kasih terhadap bantuan De Castro, raja itu menghadiahkan sejumlah besar emas. Raja juga menawarkan diri untuk memberi sebuah meriam kecil dengan nilai 20 pond emas namun iamenolaknya. Bahkan ia ber-hasil menarik dua orang keluarga raja Gowa ke Ternate dan memeluk agama Nasrani. Tampaknya keda-tangan Portugis ke Sombaopu tersebut, dengan cara pendekatan “damai” menjalin persahabatan dengan Raja Gowa Tumapa'risi Kallonna.

menunjukkan garis tanah tidak diberikan perbatasan, mengambil hasil bersama, berusaha bersama-sama, membuat rumah berdampingan, saling mengawinkan anak keturunan. Salah satu janji kita di Ajatappareng, hilaf saling memperingatkan, bersalah saling memaafkan, yang berujung kebaikan selalu berulang-ulang diakhiri kebaikan/rebah saling membangunkan hanyut saling mendamparkan, tidak saling membikin kecelakaan, tidak saling menyembunyikan sesuatu kelima berfamili tidak saling tuding menuding tidak saling cela mencela/kebaikan kita pelihara bersama kejahatan kita tolak berdua, tidak dinamai kebaikan kalau hanya satu yang diperbaiki, nanti jadi kebaikan setelah memperbaiki kita berlima/kita menganut adat masing-masing, kita mengawasi masalah kita masing-masing/saling percaya mempercayai pada kebenaran, tidak saling bohong-membohongi, satu yang sakit empat yang mengobati, dua sakit tiga mengobati, tiga sakit dua mengobati, sakit empat satu mengobati, duduk berdampingan kita berlima kita berfamili kita mencari ujung pangkalnya sampai kita dapat, kebaikan pada akhirnya).²³

Perjanjian persekutuan Lima Ajatappareng tersebut, termasuk perjanjian yang termuat dalam banyak *lontarak* dan artikel tentang Sulawesi Selatan.²⁴ Tampaknya bahwa isi perjanjian persekutuan Lima Ajatappareng bukan hanya mengandung nilai persaudaraan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan, tetapi juga mencerminkan nilai kebebasan, saling percaya, kebersamaan, dan tolong menolong dalam membangun tatanan kehidupan bersama yang sejahtera dan aman di wilayah Ajatappareng. Hal ini tercermin dari perjanjian yang diibaratkan sebuah rumah yang memiliki lima sekat, lima petak, dan lima kamar, yang mana saja disukai oleh mereka itulah yang dimasuki. Sebab, terbuka pintu kelima kerajaan itu untuk dilalui keluar masuk di antara mereka. Maksudnya kelima kerajaan yaitu Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta diumpamakan satu rumah besar yang memiliki lima sekat, lima petak, dan lima kamar. Mereka dapat atau bebas memasuki kelima kerajaan yang disukai, karena pintu kelima kerajaan itu terbuka untuk dilalui keluar masuk di antara mereka. Kesepakatan ini juga memberikan indikasi tentang adanya kesetaraan dan kebebasan. Sebab, kelima kerajaan yang melakukan persekutuan tersebut, memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama atau setara. Tidak ada di antara mereka yang dominan atau dapat memegang hegemoni kekuasaan dalam persekutuan. Setiap kerajaan mempunyai kedaulatan atas wilayah masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa

²³Naiya pada nassiturusi pada marekiengngi janci maddiolona tau riolona. Naiya jancinna limae Ajatappareng; Silellang bola lima llattek, lima lontanna, lima bilikna, kegi-kegi napoji anakna, iyani nauttamai, tattimpak tangekna limae nauttama anakna, tattimpakto tangekna limae naessuk anakna. Iyatopa janciki ikkeng ri Ajatappareng, tenrisokkang ri teyana anak-e, terilawa ri maelokna. Iyatopa janciki-ikkeng ri Ajatappareng, najellokekeng jorik tana tessitaro pakkateteng, mariru massi liweng, makkaja silallokeng mabbola siellekeng, siparukkuseng. Iyatopa janci ikkeng ri Ajatappareng, malilu sipaingekeng medeceng paggangkana, siyaokkoli-kolingekeng, naccapuri deceng/rebba sipatokkong, malik siparappekeng, tessijellokeng roppo-roppo, tessiyakkalek-kalekeng lima asseajing tessiyenrekek-keng ri buluk-buluk, tessinonnokeng ri lompok-lompok/deceng tauruk-i, jak taduwaiwi tennasenngi deceng rekko seddimi podecenngi iyapa namadecengen idik limae/tapadapoadek iadekki, tapada pobicarai, tapada tutunngi petawukik makkeda siatepperengngik, ri tongenngi tessiyabbelleik, malasai seddi mabburai eppak, malasai duwa mabburai tellu, malasai tellu mabburai duwa, masalai eppak mabburai seddi, tasitudangeng maseajing limae tasappak i pabbunganna gangka rilolonganna, deceng paggangkana (L. A. Suppa, tt: 28-29).

²⁴ Meskipun demikian tidak berhasil ditemukan perjanjian yang pertama kali diadakan, sebab yang disebutkan dalam sejumlah *lontarak* adalah pembaharuan perjanjian. Demikian pula mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan latar belakang perjanjian itu tidak dikisahkan dalam *lontarak*.

persekutuan Lima Ajatappareng bukan hanya mengandung nilai persaudaraan, persatuan dan kesatuan, tetapi juga tercermin nilai kebebasan dan kesetaraan.

Demikian pula jika disimak lebih lanjut tentang perjanjian persekutuan Lima Ajatappareng, maka tampak pula sejumlah nilai-nilai luhur, misalnya toleransi, kebersamaan, saling percaya, dan tolong menolong. Nilai-nilai luhur ini tercermin dari isi perjanjian yang antara lain menyebutkan bahwa tidak memaksakan kehendak dan tidak menghalangi keinginan; menunjukkan garis tanah tidak diberikan perbatasan; mengambil hasil bersama; berusaha bersama-sama; membuat rumah berdampingan; dan saling mengawinkan anak keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rakyat dari kelima kerajaan tersebut, memiliki kebebasan untuk menetap dan berusaha atau mencari nafkah tanpa minta izin terlebih dahulu kepada kerajaan tertentu. Juga tidak ada keharusan untuk menutup diri terhadap kerajaan lain, terutama dalam hubungan perdagangan, baik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, maupun dengan kerajaan-kerajaan yang berada di luar Sulawesi. Sekaligus raja dan rakyat dapat melakukan kawin mawin di antara mereka, tanpa dianggap melanggar adat-istiadat dari setiap kerajaan yang masuk dalam persekutuan.

Selain itu, perjanjian persekutuan Lima Ajatappareng juga mengandung nilai-nilai luhur, misalnya hilaf saling memperingatkan; bersalah saling memaafkan; rebah saling membangunkan; hanyut saling mendamparkan; tidak saling membikin kecelakaan; tidak saling menyembunyikan sesuatu; tidak saling tuding menuding; tidak saling cela mencela; kebaikan dipelihara bersama; kejahatan ditolak bersama; tidak dinamai kebaikan kalau hanya satu yang diuntungkan; menganut adat masing-masing; saling percaya mempercayai; tidak saling bohong membohongi; satu yang sakit empat yang mengobati, dua sakit tiga yang mengobati, dan seterusnya.

Pembentukan persekutuan Lima Ajatappareng, tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan kekeluargaan atau *assiajingeng* para penguasa (raja) dan rakyat kelima kerajaan (Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta), tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika politik dan ekonomi di wilayah Ajatappareng. Perkawinan di antara putra-putri para penguasa dan rakyat kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng yang senantiasa terjadi, sehingga hubungan kekerabatan kelima kerajaan itu semakin dekat. Misalnya, perkawinan antara La Cella Mata (putra Addatuang Sawitto La Paleteang) dengan Lampeweluwa (putri Datu Suppa La Makkarawi) dan We Gempo (putri Addatuang Sawitto La Paleteang) dengan La Pateddungi (putra Addatuang Sidenreng La Pasampoi). Itulah sebabnya tidak sedikit tercatat seorang raja, bukan hanya menjabat sebagai raja pada satu kerajaan, tetapi juga terkadang pada dua atau tiga dan bahkan pada kelima kerajaan di wilayah Ajatappareng, misalnya We Pasulle menjadi raja pada dua kerajaan yaitu sebagai Datu Suppa dan Addatuang Sawitto, La Pancai Tana menjadi raja pada tiga kerajaan (Datu Suppa, Addatuang Sawitto, dan Arung Rappang), dan Todani menjadi raja pada lima kerajaan (Addatuang Sidenreng, Arung Rappang, Datu Suppa, Arung Alitta, dan Addatuang Sawitto).

Sementara pengaruhnya terhadap perkembangan politik dan ekonomi pada kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng, tampaknya yang patut mendapat perhatian adalah Kerajaan Suppa dan Sawitto. Sebab, kedua kerajaan ini mengalami perkembangan sangat signifikan, baik dalam aspek politik maupun aspek ekonomi di wilayah Ajatappareng pada awal abad ke-16. Berkat dukungan dari kerajaan lain yang tergabung dalam persekutuan Lima Ajatappareng,

sehingga Kerajaan Suppa dan Sawitto berhasil membentuk kekuatan maritim yang tangguh dan berpengaruh serta berhasil menaklukkan sejumlah daerah pesisir di sepanjang pantai barat Sulawesi pada permulaan abad ke-16 (Sumber Arsip, Rol. 60/7: 40).²⁵ Selain juga, persekutuan itu juga semakin mengukuhkan kedudukan Suppa sebagai bandar niaga komoditi ekspor terutama beras dari wilayah Ajatappareng (Druce, 2009: 233). Itulah sebabnya bandar niaga Suppa dan Bacukiki semakin ramai didatangi oleh para pedagang, termasuk pedagang Melayu sehingga kedua bandar niaga itu memiliki kedudukan penting dalam perdagangan maritim. Pembuatan perahu *Soena Gading* milik Datu Suppa La Makkarawi, perahu *Lapewajo* milik Arung Parengki, dan perahu *Lapenikkeng* milik Addatuang Sawitto La Paletang merupakan bukti kemajuan mereka dalam pelayaran dan perdagangan. Demikian pula dengan pembangunan sejumlah istana (*langkanae, salassae, saworajae*) di Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta, membuktikan bahwa persekutuan Lima Ajatappareng mengalami kemajuan yang signifikan. Namun kemajuan dan perkembangan itu pula yang menjadi penyebab mereka berkonflik dengan Kerajaan Gowa-Tallo yang senantiasa pula memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan di sepanjang pesisir pantai barat Sulawesi Selatan.

D. PENUTUP

Berasarkan uraian singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa persekutuan Lima Ajatappareng dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman dalam rangka menata kehidupan bersama di wilayah Ajatappareng. Pembentukan persekutuan itu juga sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan luar atas komoditi ekspor, seiring dengan kehadiran pedagang-pedagang asing, terutama para pedagang Melayu di wilayah itu. Selain itu, pembentukan persekutuan Lima Ajatappareng juga tidak terlepas dari persaingan antara kerajaan utama di Sulawesi Selatan, untuk mengontrol perdagangan dan perluasan wilayah kekuasaan. Di samping itu, perjanjian yang mendasari terbentuknya persekutuan Lima Ajatappareng juga mengandung nilai persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, toleransi, kebebasan, persatuan dan kesatuan di antara kelima kerajaan di wilayah Ajatappareng. Bahkan perjanjian itu mengandung sejumlah nilai-nilai luhur yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam membangun kehidupan bersama di wilayah Ajatappareng. Hal inilah yang mendasari sehingga lahir sejumlah perjanjian yang dikenang oleh masyarakat sebagai suatu konvensi dalam menata kehidupan bersama dan hubungan antarkerajaan yang memandang kerajaan lain sebagai bagian yang terpisahkan dari keberadaannya.

²⁵ Berdasarkan sumber *lontarak* antara lain disebutkan bahwa Suppa dan Sawitto berhasil menaklukkan sejumlah negeri dan mengambil *seqbukati* (pampasan perang atau upeti) terhadap Leworeng, Lemo-lemo, Bulu Kapa, Bonto-bonto, Bantaeng, Segeri, dan Passokkoreng. Selain itu, mereka juga menaklukkan Baroko, Toraja, Mamuju, Kaili, Kali dan Toli-toli.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abidin, Andi Zainal. 1985. *Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara*. Bandung: Alumni.
- Amier, Sjariffudin, 1989. *Perjanjian Antarkerajaan Menurut Lontarak: Mengungkap Salah Satu Aspek Hukum Internasioanl Adat Abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Disertasi Doktor Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Andaya, Leonard. 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad 17*. Makassar: Innawa.
- Armando Cortesao, 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires and the Book of Francisco Rodrigues*. London: Robert Maclehose and Co. Ltd.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 1973. *Ikhtisan Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah N0. 5. Sumber penerbitan ini adalah dokumen pemerintah kolonial yang disebut *Algemene Verlagen*.
- Caldwell, Ian. 1988. *South Sulawesi a.d. 1300-1600: Ten Bugis Texts*. Tesis Ph.D. Australian National University.
- Druce, Stephen C.. 2009. *The Lands West of the Lakes: A History of the Ajatappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE*. Leiden: KITLV.
- Garraghan, Gilbert J., 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University Press.
- Gottschalk, Louis 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Abd. 2012. *Konfederasi Ajatappareng 1812-1906, Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis di Sulawesi Selatan*. Bangi: Disertasi Doktor Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- L.A. (Lontarak Akkarungeng) *Sidenreng*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- L.A. (Lontarak Akkarungeng) *Sawitto*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- L.A. (Lontarak Akkarungeng) *Suppa*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- L.A. (Lontarak Akkarungeng) *Alitta*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- L.A. (Lontarak Akkarungeng) *Bone*. Koleksi Laboratorium Naskah. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- L.A. (Lontarak Akkarungeng) *Wajo*. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Lontarak Sidenreng*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Lontarak Sokkuqna Wajo*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Mattulada. 1985. *Latoa, Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Sosial Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Mattulada. 1989. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mattulada. 2011. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- Pabitjara, Burhanuddin, 2006. *Persekutuan Limae Ajatappareng Abad XVI*. Makassar: Tesis Program

- Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- PaEni, Mukhlis, 1986. "Landasan Kultur Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar", dalam *Dinamika Sosial Bugis Makassar*. Ujung Pandang: PLPIIS.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1983. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Patunru, Abdurrazak Daeng. 2004. *Bingkisan Patunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur (PUSKIT) bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Hasanuddin (LEPHAS) Universitas Hasanuddin.
- Pelras, Christian, 1973. "Sumber Kepustakaan Eropa Barat Mengenai Sulawesi Selatan", dalam *Buku Peringatan; Dies Natalis Ke-XXI*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (3 Maret 1952 - 3 Maret 1973), Ujung Pandang: Unhas.
- Pelras, Christian, 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris EFEO.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Poelinggomang, Edward L., 2003. Budaya Politik Lokal Dalam Membangun Integrasi Bangsa. Makalah pada Seminar "Integrasi Bangsa" dengan tema Mengenal Budaya Lokal dalam Membangun Integrasi Bangsa, yang diselenggarakan di Makassar oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar pada tanggal 5 Juli 2003.
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L., dkk., 2005a, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L., 2005b. Sejarah Bandar Makassar. Makalah pada Seminar "Bandar Lama Makassar", yang dipresentasikan di Aula Pelindo IV, Makassar, tanggal 11 Juni 2005.
- Sjamsuddin, Helius, 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta; Ombak.
- Sumadi, Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumber Arsip, *Mikrofilm Lontarak*, Rol. 20/22: 1-2. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sumber Arsip, *Mikrofilm Lontarak*, Rol. 50/10, hlm. 51-52. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sumber Arsip, *Mikrofilm Lontarak*, Rol. 60/7: 40. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Tiele, P.A. 1880. "De Europeers in den Malaische Archipel", dalam: *BKI (Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde)*, Vol. 28 No.1.
- Zuhdi, Susanto, Penelitian Bidang Sejarah di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional: Masalah dan Prospeknya. Makalah pada Seminar Hasil Penelitian Staf Peneliti Bidang Sejarah BKSNT Se-Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta, 7 Juni 2003.